

ABSTRACT

The steps of the process of globalization the sovereignty of nation while still effective has progressively decline. The primary factor is the emergence of new international actor, productions exchange, money, technology, people and goods, move the greasing aids across national boundaries. Hence the nation state has lessened their power to regulate these flows and imposing the authorities over the domestic policy due to international surveillance. Indonesia for instance the domestic policy about prior informed consent over genetically modified organisms (GMOs) trading is influenced by International Regime Cartagena Protocol.

To response on this case this thesis will begin by explaining about how constructivism theory punctuates international actor in international environment create international regime. This thesis will comprehensively explain with unobtrusive research to present the research result in two layers. First, this thesis explains about Indonesia government ratified Cartagena Protocol thus the prior informed consent policy need to adjust with the protocol. Second layer will explain about the implementation of precautionary approach as a core of Cartagena Protocol to insist Indonesia to involve. With those explanations, we will recognize the Cartagena Protocol taking a place in formulating prior informed consent policy in genetically modified organisms trading in Indonesia.

Keywords: Indonesia, Genetically Modified Organisms, Cartagena Protocol, Prior Informed Consent.

INTISARI

Era globalisasi secara perlahan telah mengikis konsep kedaulatan negara. Negara tidak lagi mempunyai otoritas penuh dalam mengaktualisasikan kepentingannya dalam bentuk kebijakan domestik. Hal ini dikarenakan munculnya aktor internasional baru dalam sistem internasional dan juga adanya pengawasan internasional. Di Indonesia kebijakan *prior informed consent* dalam perdagangan organisme hasil modifikasi genetik adalah salah satu contoh kebijakan domestik yang dipengaruhi oleh rezim hukum lingkungan internasional Protokol Cartagena.

Sesuai dengan pokok permasalahan pertama penulis akan memaparkan teori konstruktivisme dalam menjelaskan bagaimana aktor internasional (negara) dalam lingkungan internasional membentuk sebuah rezim internasional sebagai sebuah sistem internasional. Skripsi ini akan menjelaskan secara komperhensif mengenai pengaruh Protokol Cartagena dalam kebijakan *prior informed consent* di Indonesia dengan dua bagian utama. Pertama penulis menjelaskan perihal pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Protokol Cartagena sehingga kebijakan *prior informed consent* dipengaruhi oleh Protokol Cartagena karena sebagai bentuk kepatuhan terhadap protokol. Kedua penulis menjelaskan tentang implementasi pendekatan kehati-hatian sebagai nilai dasar pembentukan protokol yang mendorong Indonesia untuk bergabung.

Penjelasan tersebut diharapkan pembaca dapat memahami alasan mengapa pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Cartagena sehingga kebijakan *prior informed consent* dalam perdagangan organisme hasil modifikasi genetik di Indonesia dipengaruhi oleh protokol karena sebagai bentuk kepatuhan terhadap protokol.

Kata kunci: Indonesia, Organisme Hasil Modifikasi Genetik, Protokol Cartagena, Prior Informed Consent.